

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Desa adalah suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang terdiri dari suatu kesatuan masyarakat yang secara hukum memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat.<sup>2</sup> Desa menjadi salah satu peran terbesar dalam berkembangnya suatu negara karena desa merupakan pondasi dari suatu negara, maju berkembangnya suatu daerah atau negara tergantung dari proses pengelolaan dalam program-program desa tersebut. Pemerintahan desa selalu menerima pendapatan dari berbagai sumber salah satunya adalah Dana Desa yang berasal dari APBN dan selalu meningkat pada setiap tahunnya. Hal tersebut telah dibuktikan dengan permintaan presiden bahwa Dana Desa dinaikkan dengan tujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat guna mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur desa. Agar pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik berbagai peraturan turunan undang-undang telah diterbitkan untuk mengatur berbagai hal tentang desa yang tertuang di dalam berbagai tingkatan, mulai dari peraturan pemerintah, peraturan menteri terkait (Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri

---

1. <sup>2</sup> Siswandi Sululing, *Akuntansi Desa Teori dan Praktek*, (Malang: CV IRDH, 2018), hlm.

dalam Negeri, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), sampai peraturan pelengkap yang diterbitkan oleh daerah. Peraturan tersebut diharapkan mampu mendorong pemerintah desa melaksanakan pengelolaan Dana Desa mulai dari pencatatan sampai pelaporan secara reliable dan tepat waktu.<sup>3</sup>

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pengelolaan keuangan desa yang berarti keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keseluruhan kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa khususnya dalam pengelolaan Dana Desa para aparatur pemerintahan desa dituntut untuk dapat memahami dan mengelola keuangan desa dengan baik dan benar. Pengelolaan keuangan desa dipantau oleh Pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan desa khususnya Dana Desa diharapkan pemerintah desa dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki untuk memajukan dan mengembangkan desanya sendiri. Pemerintahan desa yang mendapatkan pendanaan program dan kegiatan dari berbagai sumber (APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten) bisa saja ada suatu resiko kesalahan yang bersifat administratif ataupun substantif yang bisa menyebabkan terjadinya suatu permasalahan hukum. Hal ini biasanya terjadi karena belum memadainya kompetensi dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, dalam hal ini aparatur desa dituntut harus mampu mengelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan.

---

<sup>3</sup> Fahrul Kurniawan, Skripsi: *Penerapan Akuntansi Desa Pengelolaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung*, (Tulungagung: UIN Sayyid Ali Rahmatullah, 2020). hlm. 1.

Peran sistem akuntansi desa sangat penting dalam membantu pengelolaan, perencanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang digunakan sebagai penunjang program desa atau pembiayaan infrastruktur seperti pembangunan sarana prasana umum, dan non infrastruktur seperti pendidikan, budaya tradisional, pemberdayaan manusia dalam daerah dan APBDes yang bersumber dari pendapatan desa melalui bentuk usaha desa atau asset desa, retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD provinsi maupun kota/kabupaten. Hal tersebut harus sesuai dengan undang-undang mengenai tentang Dana Desa (DD) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia agar Dana Desa tersebut bisa terealisasi dengan baik dan juga sesuai dengan prosedur yang semestinya sehingga akan mempermudah dalam pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah kabupaten dalam hal ini yang berkaitan dengan Dana Desa.<sup>4</sup>

Desa Jati merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Udananwu Kabupaten Blitar. Setiap tahunnya Desa Jati selalu mendapatkan pendapatan dari berbagai sumber salah satunya adalah Dana Desa. Berikut adalah penerimaan Dana Desa di Desa Jati dalam 5 tahun terakhir ini.

---

<sup>4</sup> Ibid., hlm. 2.

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Dana Desa 5 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Jumlah Penerimaan
1	2016	Rp.608.973.000
2	2017	Rp.774.951.000
3	2018	Rp.714.717.000
4	2019	Rp.814.826.000
5	2020	Rp.839.379.000

*Sumber: Kantor Desa Jati*

Tabel di atas menggambarkan bahwa Dana Desa mengalami kenaikan di tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Penerimaan Dana Desa yang meningkat pada setiap tahunnya diharapkan dana tersebut dapat dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi ekonomi desa. Namun dalam proses penerimaan Dana Desa, masih sering terjadi masalah akan keterlambatan dalam pencairan dana yang mengakibatkan program yang direncanakan tidak terlaksana dengan baik.

Saat penerimaan dana, Bendahara Desa akan mengecek saldo rekening bank kas desa, jika saldo rekening sudah sesuai maka dilakukan pencatatan. Agar pencatatan akuntansi desa transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai undang – undang yang berlaku maka diperlukan suatu sistem dan prosedur akuntansi Dana Desa. Pencatatan penerimaan dana di Desa Jati itu sendiri dilakukan oleh kaur keuangan atau Bendahara Desa dan dalam pencatatannya sudah menerapkan sistem akuntansi yang sudah terkomputerisasi dengan menggunakan aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). Sistem ini diterapkan pada tahun 2017 yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam pencatatan laporan keuangan desa. Bendahara desa dalam melaksanakan pencatatannya masih sering

mengalami kendala dalam penggunaan aplikasi Siskeudes, dikarenakan karena adanya keterbatasan pengetahuan dalam hal akuntansi dan karena latar belakang pendidikan hanya lulusan SMA, serta kurangnya pelatihan dalam menjalankan aplikasi Siskeudes.

Dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Udanawu peneliti memilih Desa Jati karena di antara Desa Jati merupakan desa yang paling berprestasi dan dikenal sudah menjalankan pemerintahannya dengan teratur khususnya pada sistem dan prosedur akuntansinya, namun pada kenyataannya masih juga ditemukan adanya kendala. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait sistem penerimaan dan prosedur akuntansinya dengan judul penelitian **“Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Dana Desa di Desa Jati Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka penelitian ini berfokus pada penerapan sistem penerimaan kas dan prosedur akuntansi pengelolaan Dana Desa di Desa Jati Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. Pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem akuntansi penerimaan kas Dana Desa pada pemerintahan Desa Jati Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana prosedur akuntansi pengelolaan Dana Desa pada pemerintahan Desa Jati Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mendiskripsikan sistem akuntansi penerimaan kas Dana Desa pada pemerintahan Desa Jati Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.
2. Mendiskripsikan prosedur akuntansi pengelolaan Dana Desa pada pemerintahan Desa Jati Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

### **D. Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini memiliki batasan, dimana penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan penerapan sistem akuntansi Dana Desa berupa sistem penerimaan kas yang berkaitan dengan penerimaan Dana Desa pada tahun 2020 dan prosedur akuntansi pengelolaan Dana Desa pada pemerintahan Desa Jati Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu khususnya dalam pengembangan ilmu akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan penerapan sistem penerimaan kas dan prosedur akuntansi pengelolaan Dana Desa di Desa Jati Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Institusi

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai wawasan serta referensi mengenai penerapan sistem penerimaan kas dan prosedur akuntansi pengelolaan Dana Desa pada suatu lembaga pemerintahan desa.

### b. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan literatur atau pembelajaran bagi mahasiswa mengenai penerapan sistem penerimaan kas dan prosedur akuntansi pengelolaan Dana Desa pada suatu lembaga pemerintahan desa.

### c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk membantu bagi pihak-pihak yang membutuhkan pemahaman mengenai penerapan sistem penerimaan kas dan prosedur akuntansi pengelolaan Dana Desa pada pemerintahan Desa Jati Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

## F. Definisi Istilah

Untuk memudahkan pemahaman judul penelitian “Penerapan Sistem Penerimaan Kas dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana di Desa Jati Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar”. Oleh karena itu penulis menyajikan definisi istilah atas judul yaitu:

## 1. Secara Konseptual

- a. Dana Desa merupakan dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan diutamakan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>5</sup>
- b. Keuangan Desa merupakan suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan keuangan desa yang terdiri atas pendapatan, belanja, pembiayaan yang telah diatur dalam pengelolaan keuangan desa.<sup>6</sup>
- c. Sistem akuntansi adalah suatu metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan perusahaan atau organisasi. Sistem akuntansi merupakan organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan laporan keuangan bagi pihak yang membutuhkan.<sup>7</sup>
- d. Akuntansi Desa adalah pencatatan dari berbagai transaksi yang terjadi di desa, dengan dibuktikan oleh nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.<sup>8</sup>

## 2. Secara Operasional

---

<sup>5</sup> PP No. 6 Tahun 2014.

<sup>6</sup> Rian Nugroho dan Firre An Suprpto, *Manajemen Keuangan Desa*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021), hlm. 6.

<sup>7</sup> Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 3.

<sup>8</sup> Siswandi Sululing, *Akuntansi Desa Teori dan Praktek*, (Malang: CV IRDH, 2018), hlm.

Istilah yang perlu ditegaskan dalam “Penerapan Sistem Penerimaan Kas dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Jati Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar” adalah pada penelitian ini nantinya akan mendeskripsikan mengenai “Penerapan Sistem Penerimaan Kas serta Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Jati Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi berguna untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui urutan-urutan sistematika dari isi skripsi. Sistematika skripsi ini dibagi menjadi tiga yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Berikut penjelasannya:

#### **BAGIAN AWAL**

Pada bagian terdiri atas halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, dan halaman abstrak.

#### **BAGIAN UTAMA**

Bagian utama merupakan bagian inti hasil penelitian yang terdiri atas enam bab sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menyajikan gambaran singkat mengenai penelitian yang akan dibahas. Pada bagian terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, dan kegunaan penelitian.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berguna untuk menjelaskan mengenai beberapa pokok yang terkait dengan tinjauan teoritis mengenai “Penerapan Sistem Penerimaan Kas dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari 1) Pendekatan dan Jenis Penelitian, 2) Lokasi Penelitian, 3) Kehadiran Penelitian, 4) Data dan Sumber Data, 5) Teknik Pengumpulan Data, 6) Teknik Analisis Data, 7) Pengecekan Keabsahan Temuan, 8) Tahap-Tahap Penelitian.

## BAB IV HASIL PENELITIAN

Merupakan bagian yang berisi tentang materi-materi yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diambil dari beberapa sumber tertulis yang digunakan sebagai acuan data dalam paparan data dan temuan penelitian.

## BAB V PEMBAHASAN

Pembahasan ini mengenai “Penerapan Sistem Penerimaan Kas dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Jati Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

## BAB VI PENUTUP

Bab ini terdiri dari 1) Kesimpulan, 2) dan Saran atau Rekomendasi.

## **BAB AKHIR**

Bab ini merupakan bagian paling akhir dari skripsi. Pada bab ini terdiri atas daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.